# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemerintah sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat Indonesia, dikarenakan dana yang diperoleh pemerintah merupakan penerimaan atas pembayaran pajak, iuran dan sumbangan yang masyarakat berikan. Pelayanan dan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan publik merupakan aktivitas yang dilakukan pemerintah selaku organisasi sektor publik. Banyak pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, salah satunya penangganan akan sampah yang merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Deni Nurdian kepada kompas.com menjelaskan, di kota bandung dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya terutama mengenai pengelolahan sampah yang rata-rata bervolume mencapai 1.500 ton per hari dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarmukti, Pemkot Bandung telah membuat sejumlah program inovatif dalam hal tata kelola sampah. Salah satunya, dengan merekrut 1.590 petugas pembersih gorong-gorong dan penguatan program kewilayahan.

Dalam penangananya terhadap sampah di kota Bandung, Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan kota Bandung terus meningkatkan kinerja dalam hal penangganan sampah yang diharapkan kebersihan Bandung pun meningkat dan terus menjadi yang terbersih di Indonesia. Direktur Umum Perusahaan Daerah

(PD) Kebersihan kota Bandung, Gungun Saptari Hidayat, ST kepada fokusjabar.com menuturkan dalam peningkatan kinerja penanganan sampah di Kota Bandung, pihaknya sudah menyiapkan empat program utama. Mulai dari peningkatan kinerja internal, sarana prasarana, hingga peningkatan kesadaran masyarakat. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan kota Bandung pun sudah menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam hal penindakan terhadap penanganan sampah yang melanggar aturan. Selain itu, akan ada Pelaksanaan Patroli Kebersihan (PPK) yang bertugas memberikan edukasi ke lapangan dan termasuk juga menegur yang membuang sampah sembarangan. Tapi yang menjadi tanggung jawab Perusahaan Daerah (PD) Kebesihan hanya sampah di jalan protokol dan sampah yang diangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam menjalankan tugasnya Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan mendapatkan dana salah satunya dari pendapatan jasa yang berasal dari rumah tinggal, komersial & non komersial, pasar, pedagang sektor informal (PKL) & angkutan umum.

Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk *brutto* dari manfaat ekonomi selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas (Nelson Lam dan Peter Lau : 2014: 317). Pendapatan merupakan penerimaan yang muncul dari aktifitas biasa dari sebuah entitas dan merajuk pada keberagamaan nama, termasuk penjualan, pembayaran, bunga, dividen, royalti dan sewa. Pendapatan diakui ketika ini memungkinkan bahwa maanfaat ekonomis masa depan akan mengalir ke entitas dan keuntungan

bisa diukur secara andal. IAS (*Internasional Accounting Standards*) 18 pendapatan mengidentifikasi keadaan dengan kriteria pengakuan akan dipertemukan dan, pendapatan akan diakui. Penerimaan pendapatan jasa merupakan penerimaan kas terbesar yang didapatkan oleh Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan kota Bandung. Kepala Bidang Penagihan PD Kebersihan Kota Bandung, Anung Dudung menyebutkan bahwa pada tahun 2015 pemasukan yang didapat dari iuran warga hanya sebesar 37 persen dari seluruh rumah huni yang terdaftar di PD Kebersihan Kota Bandung. Dari total keseluruhan jumlah 477 ribu rumah huni yang ada di Kota Bandung yang baru membayar sekitar 162 ribu.

Selama ini warga membayar iuran ke Rukun Warga (RW). Setelah itu pihak kewilayahan akan menyetorkan ke PD Kebersihan untuk mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah tersebut. Tentunya hal ini berdampak besar pada kinerja pengangkutan sampah. Wilayah yang banyak warganya belum membayar maka sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) tidak akan diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ini berakibat menumpuknya sampah. Persoalan penagihan yang minim terkendala di masyarakat atau pihak penagih. Biaya iuran sampah yang dibebankan ke rumah hanya berkisar antara Rp 3.000 - Rp 20.000/ Bulan. Pada tahun 2015, PD Kebesihan memperoleh penghasilan sebesar Rp 24 miliar yang di antaranya bersumber dari iuran rumah tinggal. Di mana total dari rumah hanya berkisar Rp 8 miliar, Jumlah tersebut masih jauh dari target yang sudah diperhitugkan.

Kerangka kerja konseptual FASB (*Financial Accounting Standards Boards*) telah mengidentifikasi dua kriteria yang seharusnya dipertimbangkan

dalam menentukan kapan pendapatan dan keuntunngan seharusnya diakui. Pendapatan dan keuntungan umumya diakui ketika (1) telah direalisasi atau dapat direalisasi (*realized)*, dan (2) telah dihasilkan / telah terjadi. Pendapatan dikatakan telah direalisasi (*realized)* jika barang atau jasa telah dipertukarkan dengan kas. Pendapatan telah dikatakan dapat direalisasi (*realizable)* apabila aktiva yang diterima dapat segera dikonversi ke kas. Pendapatan telah dihasilkan atau telah terjadi (*earned)* apabila perusahaan telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan hak atas pendapatan tersebut.

Kedua kriteria diatas umumnya terpenuhi pada saat titik penjualan (*point of sales)*, di mana pendapatan akan diakui ketika barang telah dikirim atau jasa telah diberikan ke pelanggan. Atau dengan kata lain, pendapatan diakui ketika perusahaan telah memberikan sebagian besar barang atau jasa yang dijanjikannya kepada pelanggan (dalam hal ini, pendapatan dikatakan telah berhasil atau telah terjadi melalui penyelesaian secara substansial aktivitas yang teribat dalam proses pembentukan pendapatan) dan ketika pelangan telah memberikan pembayaran (telah direalisasi) atau setidaknya janji pembayaran yang sah kepada perusahaan (dapat direalisasi). Pengakuan pendapatan pada saat titik penjualan ini umumnya menyediakan pengujian yang telah seragam, objekif, dan logis. Pendapatan bisa juga diakui pada saat kas diterima jika tingkat kolektibilitas (tertagihanya) piutang atas produk atau jasa yang dijual meragukan. Dalam hal ini pendapatan akan diakui pada saat kas diterima (bukan pada saat penjualan).

Penelitian sebelumnya, Nur Fakhrur Razy (2012) tentang analisis pengendalian internal atas siklus pendapatan jasa studi kasus pada hotel griyadi

montana malang. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara umum sistem informasi akuntansi atas siklus pendapatan yang ada sudah cukup efektif, perusahaan sudah mampu memproses dokumen dan menyediakan informasi untuk pembuat keputusan, seperti manager. Walaupun masih terdapat kelemahan dari segi pengendalian organisasional, serta kurang optimalnya pengendalian asset, pengendalian dokumentasi, dan pengendalian otorisasi yang telah dilakukan. Selain itu, perusahaan juga belum mempunyai *standart operating procedure* dan kebijakan akuntansi secara tertulis yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh karyawan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, permasalahan tersebut perlu diperbaiki dengan melakukan perbaikan pada struktur organisasi, dimana pengendalian organisasi mempunyai keterkaitan erat dengan pengendalian lainnya. Disamping itu juga perlu meningkatkan pengendalian asset, pengendalian dokumentasi, dan pengendalian otorisasi yang telah dilakukan. Serta menyusun *standart operating procedure* dan kebijakan akuntansi secara tertulis.

Permasalahan yang terjadi pada Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan kota Bandung adalah pengguna layanan jasa kebersihan yang terlambat melakukan pembayaran, salah melakukan penyetoran atau pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang harus dibayar. Hal ini dikarenakan pengguna layanan jasa kebersihan yang tidak mau membayar restibusi, MoU yang habis masanya dan belum diperbaharui, serta pengenaan tarif yang tidak sesuai dengan kenyataanya. Akibatnya pendapatan yang telah ditargetkan dengan realisasi/ kenyataanya tidak terpenuhi dan tidak maksimal serta timbulnya piutang kepada para pengguna

layanan kebersihan. Selain itu masalah yang terjadi adalah saat dilakukanya data ulang pengenaan tarif baru adanya kecemburuan sosial antara perbedaan pembayaran sampah antara ruko satu dengan ruko yang lainya, hal tersebut dapat menghambat proses pembayaran pelayanan jasa.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui penerimaan pendapatan jasa pada PD Kebesihan Kota Bandung. Dengan demikian penulis menggangkat judul penelitian **"Tinjauan Atas Penerimaan Pendapatan Jasa pada Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung ".**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di identifikasi bahwa masalah yang terjadi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran sampah membuat pendapatan jasa pada Perusahaan Daerah (PD) Kebesihan kota Bandung tidak sesuai target**.**

## 1.3 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerimaan pendapatan jasa yang diterima oleh PD Kebersihan.
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam penerimaan pendapatan jasa pada PD Kebersihan.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerimaan pendapatan jasa pada PD kebersihan.

## 1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

### 1. 4.1 Maksud

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai bagaimana penerimaan pendapatan jasa pada Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung.

### 1. 4.2 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan pendapatan jasa yang diterima oleh PD Kebersihan**.**
2. Untuk mengetahui hambatan pada PD Kebersihan dalam penerimaan pendapatan.
3. Untuk mengetahui upaya pada PD Kebersihan dalam penerimaan pendapatan.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

### 1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktisi dari penelitian yaitu penulis harapkan dapat menjadi masukkan dan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan keputusan yang tepat bagi pihak perusahaan dan dapat memberikan informasi tentang penerimaan pendapatan jasa rumah tinggal, komersial, non komersial, PKL serta angkutan umum dan sebagai bahan evaluasi bagi para praktisi

pendidikan, khususnya di PD Kebersihan tentang penerimaan pendapatan jasa rumah hunian, komersil, non komersil, Pedagang sektor informal (PKL), dan angkutan umum yang sudah ada.

### 1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama dalam hal membandingkan keterkaitan dengan mata kuliah yang ada pada jurusann akuntansi yaitu akuntansi keuangan serta menambah wawasan mengenai pendapatan dalam akuntansi keuangan.

## 1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.6.1 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah, Penelitian ini dilakukan penulis di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung JL. Surapati No. 126**.**

### 1.6.2 Waktu Penelitian

**Tabel 1.1**

**Waktu Pelaksanaan Penelitian**

| NO | Kegiatan Kerja Praktek | Bulan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maret 2015 | April 2015 | Mei 2015 | Juni 2015 | Juli 2015 | Agustus 2015 |
| I | **Tahap Persiapan** | | | | | | |
| | 1. Mengajukan penelitian | ■ | | | | | |
| | 2. Menentukan tempat penelitian | ■ | | | | | |
| II | **Tahap Pelaksanaan** | | | | | | |
| | 1. Mengajukan Surat Pengantar Perusahaan | ■ | | | | | |
| | 2. Pengumpulan Data | | ■ | | | | |
| | 3. Melakukan Penelitian | | ■ | ■ | ■ | | |
| III | **Tahap Pelaporan** | | | | | | |
| | 1. Bimbingan Laporan Tugas Akhir | | ■ | ■ | ■ | | |
| | 2. Revisi Laporan Tugas Akhir | | | | | ■ | |
| IV | **Tahap Penggujian** | | | | | | |
| | 1. Sidang | | | | | | ■ |
| | 2. Revisi Laporan Tugas Akhir | | | | | | ■ |